

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap warga Negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal tersebut telah tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

“Proses pendidikan merupakan seperangkat upaya untuk merubah input menjadi output yang diharapkan” (Kusnandi K. , 2018). Setiap orang tentunya lebih menyukai menuntut ilmu di lembaga pendidikan yang bermutu dan berkualitas. “Sekolah dianggap bermutu apabila para siswanya sebagian besar atau seluruhnya, memperoleh nilai atau angka yang tinggi, sehingga berpeluang melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.” (Gustini, 2019) dan disebutkan “Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas siswa yang dikembangkan dengan cara membebaskan siswa dari ketidak tahuan dan ketidak mampuan.” (Baro'ah, 2020) Maka dari itu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan merupakan suatu isu yang terus dibahas dalam manajemen pendidikan/pengelolaan pendidikan. Mutu pendidikan merupakan suatu usaha yang harus terus diupayakan agar tercapainya pendidikan yang sesuai harapan dan relevan. Pendidikan yang berkualitas merupakan harapan dan tuntutan dari seluruh stakeholder dalam dunia pendidikan. Atas pernyataan tersebut maka lembaga pendidikan harus mampu menciptakan pelayanan dan mutu yang baik agar dapat bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. (Fadhil, 2017)

Oleh karena itu, dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005

Utia Rusdah, 2022

ANALISIS IMPLEMENTASI BIMTEK FASILITASI BERDASARKAN SNP PADA PROGRAM SISTEM PENJAMINAN MUTU DI LPMP PROVINSI BANGKA BELITUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Adapun standar yang menjadi dasar bagi penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 adalah 1) standar isi, 2) Standar Proses, 3) Standar Kompetensi Lulusan, 4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 5) Standar Sarana dan Prasarana, 6) Standar Pengelolaan, 7) Standar Pembiayaan, dan 8) Standar Penilaian Pendidikan. Standarisasi pendidikan memiliki makna sebagai upaya penyamaan arah pendidikan secara nasional yang mempunyai keleluasaan dan keluwesan dalam implementasinya. SNP harus dijadikan acuan oleh pengelola pendidikan menjadi pendorong tumbuhnya inisiatif dan kreativitas dari pengelola pendidikan untuk mencapai standar yang ditetapkan. Standar Nasional Pendidikan digunakan pada Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada Jalur Pendidikan formal, Jalur Pendidikan nonformal, dan Jalur Pendidikan informal.

pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan menjadi pertimbangan pertama terbitnya PP 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional. Selain itu PP 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional juga memiliki latar belakang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini, sehingga perlu diganti dengan Standar Nasional Pendidikan yang sesuai dengan perkembangan sekarang.

Dalam mendukung tercapainya SNP banyak upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Salah satu upaya tersebut telah diterbitkan Permendikbud Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu

Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikbud, 2016) maka setiap satuan pendidikan diwajibkan untuk membentuk SPMI. Pasal 2 menyebutkan bahwa fungsi dan tujuan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP), yaitu (1) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah berfungsi untuk mengendalikan penyelenggaraan pendidikan oleh satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah sehingga terwujud pendidikan yang bermutu; dan (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah bertujuan untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.

Salah satu pihak yang bertanggungjawab dalam upaya peningkatan mutu sekolah merupakan tanggungjawab Pemerintah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang berada di bawah Kemendikbud. Sejatinnya kinerja LPMP dapat diamati dari sejauh mana fungsi dan peran yang telah berlangsung selama ini dapat dideskripsikan secara holistik dan bagaimana pula perspektif masa mendatang LPMP dalam memberikan penjaminan mutu.

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) memiliki tugas dalam menjamin mutu pendidikan pada jenjang dasar dan menengah yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan (Alfarisa, 2015). Yang disebut dengan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pada tahun 2020, rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka pengumpulan data mutu baik untuk satuan pendidikan dasar dan menengah maupun wilayah terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yaitu:

- Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengumpulan Data Mutu Pendidikan bagi Fasilitator Daerah. Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari Pengawas Sekolah, Operator Sekolah jenjang SD, SMP dan SMA, Operator Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota serta peserta dari LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring;
- Bimbingan Teknis Pengumpulan Data Mutu Pendidikan bagi Operator Sekolah jenjang SD, SMP dan SMA, yang terdiri dari delapan angkatan. Kegiatan ini melibatkan seluruh operator sekolah jenjang SD, SMP,

SMA dan SLB di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring;

- Pendampingan dan Verval Pengumpulan Data Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten/Kota. Kegiatan ini dilaksanakan disatuan pendidikan secara tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol Kesehatan

Namun dimasa pandemi Covid-19 seperti saat ini menyebabkan banyak pendidik mengalami kesulitan untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran yang bermakna dalam rangka menyiapkan peserta didik untuk memiliki kecakapan abad ke-21. Selain itu kurangnya pemahaman para pendidik terhadap konsep PISA (*Programe for International Student*) dan *Asesmen* Nasional serta bagaimana implikasi PISA dan Asesmen Nasional. Kecakapan literasi saat ini menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga menyelenggarakan tes serupa yaitu Indonesia *Nastional Asesment Program (INAP)*. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, meletakkan penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Sebagai focus dalam standar nasional Pendidikan lulusan pada satuan Pendidikan.

Dilandasi dengan kesadaran akan pentingnya Pendidikan dimasa kini dan masa mendatang, baik buruk suatu Pendidikan sangat bergantung pada penjaminan mutu oleh karena itu sebagai bentuk kelanjutan komitmen untuk menjamin mutu Pendidikan kementerian Pendidikan dan kebudayaan LPMP mengambil kebijakan untuk merancang, menetapkan, dan melaksanakan penjaminan mutu Pendidikan. LPMP merasa bertanggung jawab untuk memberikan pemahaman dan membantu para tenaga pendidik untuk bisa memberikan upaya pembelajaran yang efektif dalam keadaan pandemi sekaligus mensosialisasikan mengenai PISA, maka LPMP membuat program penjaminan mutu yaitu Bimtek (Bimbingan Teknis) berdasarkan SNP (Standar Nasional Pendidikan). Dan untuk bisa memberikan pelayanan pendidikan kepada semua satuan pendidikan di seluruh wilayah Bangka

Utia Rusdah, 2022

ANALISIS IMPLEMENTASI BIMTEK FASILITASI BERDASARKAN SNP PADA PROGRAM SISTEM PENJAMINAN MUTU DI LPMP PROVINSI BANGKA BELITUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Belitung serta untuk meningkatkan kualitas mutu satuan pendidikan di daerah kepulauan untuk mencapai standar nasional Pendidikan.

Berdasarkan program penjaminan mutu diatas khususnya bimbingan teknis yang dilaksanakan LPMP dalam penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Bangka Belitung, mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang mendalam dengan judul “Analisis Implementasi Bimtek Fasilitasi Berdasarkan SNP pada Program Sistem Penjaminan Mutu di LPMP Provinsi Bangka Belitung”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Terkait dengan judul yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: “Analisis Implementasi Bimtek Fasilitasi Berdasarkan SNP pada Program Sistem Penjaminan Mutu di LPMP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”, menimbulkan beberapa permasalahan yang muncul dari peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan Bimtek fasilitasi berdasarkan SNP pada program penjaminan mutu di LPMP Provinsi Bangka Belitung?
2. Bagaimana isi dan metode dari Bimtek fasilitasi berdasarkan SNP pada program penjaminan mutu di LPMP Provinsi Bangka Belitung?
3. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dari Bimtek fasilitasi berdasarkan SNP pada program penjaminan mutu di LPMP Provinsi Bangka Belitung?
4. Bagaimana hasil dari Bimtek fasilitasi berdasarkan SNP pada program penjaminan mutu di LPMP Provinsi Bangka Belitung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai implementasi bimtek fasilitasi berdasarkan SNP pada program sistem penjaminan mutu di LPMP Bangka Belitung, terkhususnya dalam hal proses, isi, factor pendukung/penghambat dan hasil dari Bimtek itu sendiri

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini, yaitu:

- a) Terdeskripsikannya data dan informasi mengenai pelaksanaan Bimtek fasilitasi berdasarkan SNP pada program sistem penjaminan mutu oleh LPMP Bangka Belitung
- b) Terdeskripsikannya data dan informasi mengenai isi dan metode Bimtek fasilitasi berdasarkan SNP oleh LPMP Provinsi Bangka Belitung?
- c) Terdeskripsikannya data dan informasi mengenai faktor pendukung dan penghambat Bimtek fasilitasi berdasarkan SNP oleh LPMP Provinsi Bangka Belitung?
- d) Terdeskripsikannya data dan informasi mengenai hasil dari Bimtek fasilitasi berdasarkan SNP oleh LPMP Provinsi Bangka Belitung?

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Manfaat penelitian ini dilihat dari segi teoritis adalah agar dapat mengembangkan khasanah keilmuan bidang Administrasi Pendidikan terkait analisis implementasi Bimtek fasilitasi berdasarkan SNP pada program sistem penjaminan mutu di LPMP Bangka Belitung.

2. Manfaat Praktik

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditentukan diatas, pada dasarnya penulis mengharapkan dari hasil penelitian ini nantinya akan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan:

a) Bagi Lembaga

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan evaluasi untuk lembaga dalam mengembangkan dan meningkatkan implementasi Bimtek fasilitasi berdasarkan SNP pada program system penjaminan mutu di LPMP Bangka Belitung.

b) Bagi Penulis

Hasil penelitian ini menjadi suatu objek nyata penerapan dari teori-teori yang dipelajari selama perkuliahan dan dibandingkan dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Serta dapat menambah wawasan bagi penulis

Utia Rusdah, 2022

ANALISIS IMPLEMENTASI BIMTEK FASILITASI BERDASARKAN SNP PADA PROGRAM SISTEM PENJAMINAN MUTU DI LPMP PROVINSI BANGKA BELITUNG

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

khususnya mengenai implementasi Bimtek fasilitasi berdasarkan SNP pada program system penjaminan mutu di LPMP Bangka Belitung.

1.5 Struktur Organisasi Tesis

Pada bagian ini dikemukakan sistematika penulisan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Berisi rincian tentang urutan penulisan dari setiap bab dan bagian bab dalam karya ilmiah dari mulai bab I hingga bab V dan daftar pustaka. Yang terinci sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini menjadi bab perkenalan dan merupakan bagian awal dari tesis ini. Pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi tesis.

BAB II Kajian Teori. Bab ini berisikan mengenai teori yang relevan dengan masalah penelitian dalam bidang yang sedang diteliti serta dapat dijadikan sebagai landasan analitik dalam analisis temuan.

BAB III Metode Penelitian. Bab ini merupakan penjabaran tentang metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian. Bahasan mengenai metode penelitian memuat beberapa komponen, yaitu sebagai berikut 1) Desain penelitian. 2) Objek dan Tempat penelitian. 3) Instrumen penelitian 4) Teknik pengumpulan data 5) Informan penelitian

BAB IV Temuan dan Pembahasan. Bab ini memuat dua hal utama, yakni: 1) Temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian. 2) Pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi. Bab ini menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian, sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian tersebut.

Utia Rusdah, 2022

*ANALISIS IMPLEMENTASI BIMTEK FASILITASI BERDASARKAN SNP PADA PROGRAM SISTEM PENJAMINAN MUTU DI LPMP
PROVINSI BANGKA BELITUNG*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu